

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MELALUI INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA

Y.A Wahyudin¹, Ahmad Mubarak Munir², Khairur Rizki³

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Mataram

aria_wahyuddin@unram.ac.id

Page | 226

Abstrak

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diakui sebagai tujuan pariwisata internasional. Sebagai daerah tujuan pariwisata internasional di NTB, Lombok, memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan (pelancong) mancanegara asal Eropa, Australia, Tiongkok, Asia Tenggara (Malaysia dan Singapura), dan Timur Tengah. Keamanan Manusia menjadi konsep yang relatif baru yang menitikberatkan keamanan individu sebagai objek yang harus diutamakan. Konsep yang diperkenalkan UNDP tahun 1994 ini menekankan beberapa aspek yang kemudian beririsan dengan Indikator Pembangunan Manusia yang terdiri dari indikator Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Dalam mendukung tingkat pembangunan manusia yang lebih baik di KEK Mandalika setidaknya proses pendampingan ditempuh dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat, memberikan pemahaman mengenai indikator pembangunan manusia dan hak masyarakat sebagai hasil dari pembangunan. Dengan demikian hal ini mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai katalisator pencapaian pembangunan manusia yang lebih baik.

Kata kunci: KEK Mandalika, IPM, pendampingan, kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan

Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam mengukur baik atau tidaknya kualitas manusia pada suatu wilayah atau daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dibandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia saat ini masih berada pada urutan 29 dari 34 Provinsi yang tersebar di Indonesia dilihat dari kualitas pembangunan manusianya. Hal ini tentu saja memiliki arti bahwa Nusa Tenggara Barat masih atau sedang berada pada angka yang rendah dalam tahap pembangunan di daerahnya.¹ Secara tidak langsung ini menjadi suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketertinggalan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia yang dapat dikatakan berhasil adalah jika kemajuan yang ingin dicapai oleh masyarakat terakomodasi dan menjamin bahwa masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang terjadi di daerah merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memajukan masyarakatnya menjadi lebih makmur dan sejahtera terutama sekali dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, jika dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari tahun ketahun yakni pada tahun 2019, IPM provinsi NTB sebesar 68,14 kemudian pada tahun 2020 mencapai 68,25 persen. Hal di atas dibuktikan dengan adanya angka Usia Harapan Hidup (UHH) berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018

sampai dengan 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2018 hingga 2020, UHH Perempuan di Nusa Tenggara Barat meningkat dari 63,88 menjadi 64,63 tahun sedangkan untuk Laki laki meningkat dari 67,75 menjadi 68,39 tahun.²

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) ini merepresentasikan salah satu indikator yang digunakan sebagai salah satu upaya pembangunan manusia dalam dimensi kesehatan. UHH ini juga merefleksikan usia hidup dan ukuran status Kesehatan masyarakat suatu wilayah secara umum. Indikator ini kemudian nantinya akan memberikan gambaran terkait hasil dari keseluruhan kegiatan pembangunan manusia dalam upaya meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dimensi umur panjang dan hidup sehat ditentukan oleh Usia Harapan Hidup suatu penduduk, dimana semakin tinggi nilai usia Harapan Hidup yang dicapai oleh suatu wilayah akan berkorelasi pada semakin tingginya derajat pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut, oleh karena itu Usia Harapan Hidup sebagai tolak ukur umur panjang dan hidup sehat sangat memiliki peranan yang penting karena dapat menentukan bagaimana rata-rata usia hidup yang di tempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah yang tentu saja berdampak besar pada pembangunan.³

Selain melihat dimensi kesehatan, Pendidikan juga merupakan sesuatu yang penting dalam proses pembangunan manusia secara umum, tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan yang baik dapat dilihat dari bagaimana suatu Pemerintah Daerah mampu untuk memberikan dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat dari mulai pemerataan pendidikan sampai dengan kualitas yang dibutuhkan dalam pendidikan. Seperti pemerataan jumlah sekolah di masing-masing wilayah suatu daerah sampai dengan kualitas sekolah di daerah tersebut dari mulai siswa, tenaga pengajar, buku-buku dan juga kualitas tempat sekolah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi ke 33 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hal ini tentu menjadi konsen bersama dan menunjukkan ada paradigma yang salah dalam pembangunan sektor Pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2019, jumlah satuan pendidikan di Indonesia lebih dari 215 ribu. Sekolah dengan standar mutu baik hanya sekitar 40 ribu atau 18,8 persen, Provinsi NTB memiliki 314 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan hanya 26 SMA yang masuk dalam kategori standar baik.⁴ Demikian juga jika ditinjau dari sektor ekonomi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi NTB turun 0.64% dibandingkan tahun 2019 yang naik sebesar 3.85%, mengalami inflasi sebesar 0.600% lebih rendah dibanding 2019 yang tercatat 1.53%. Ditinjau dari segi kesejahteraan, pada tahun 2020 terjadi penurunan, angka kemiskinan tercatat 14.235 mengalami peningkatan sebesar 13.97% dari tahun 2019.⁵

Jika dilihat dari perspektif pembangunan manusia, Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu harus membangun kerangka pembangunan yang lebih holistik untuk menjawab tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Laju pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan harus didukung dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik. Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai pusat pembangunan infrastruktur terintegrasi harus mendapat perhatian dalam sektor pengembangan SDM. Masyarakat harus mendapat dampak dari pembangunan tersebut, setidaknya dalam tiga sektor utama di atas tadi. Mengacu pada data BPS, Lombok Tengah berada pada posisi ke-7 dari seluruh kabupaten kota di NTB,⁶ data ini tentu menjadi tantangan tersendiri mengingat geliat pembangunan di Lombok Tengah yang secara signifikan meningkat.

1. Pemecahan Masalah

Diseminasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu langkah untuk memberikan kesadaran akan hak yang dimiliki masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan masyarakat secara proaktif menjadi katalisator dalam mendorong kerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan fasilitas pendukung kerangka pembangunan sumber daya manusia. Membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat menjadi strategi timbal balik antara penyedia layanan dalam hal ini pemerintah dan pengguna layanan yaitu masyarakat. Pembangunan akan jauh lebih sistematis dan terarah dengan melibatkan dan analisis kebutuhan pengguna layanan tersebut.

2. Tujuan Kegiatan

Adapun penguatan masyarakat KEK Mandalika melalui pemahaman Indikator Pembangunan Manusia antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya Pembangunan Manusia bagi masyarakat di kawasan KEK Mandalika;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak yang dimiliki dalam konteks pembangunan manusia;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan aspek pembangunan manusia.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini kami rancang untuk memberikan penguatan pada masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan dimensi pembangunan manusia, diseminasi mengenai hak dan kewajiban dalam mengakses berbagai fasilitas harus dipahami tidak hanya bersifat *top-down* namun harus juga dipahami sebagai kerangka *bottom-up*. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah masyarakat kawasan ekonomi khusus Mandalika yang kemudian sebagian terorganisir dalam SWIM atau Solidaritas Warga Intern Mandalika dan masyarakat Desa Rambitan. Kegiatan kami fokuskan di Gedung Serbaguna Desa Rambitan sekaligus berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Rambitan. Metode yang digunakan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika antara lain dengan memberikan paparan oleh narasumber, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan, dan simulasi-simulasi yang relevan dengan persoalan di atas.

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Keamanan menjadi isu yang terus diperjuangkan, diproduksi, dan didesiminasikan, dunia melakukan berbagai upaya dalam mendorong terwujudnya keamanan dunia berupa ketiadaan perang. Perang dunia I dan II telah mengajarkan dunia mengenai mahalanya perdamaian dan usaha dalam mewujudkannya, harapan mengenai dunia yang harmonis tentumenjadi tujuan bersama, namun tentu konflik dan peperang di beberapa belahan dunia menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ramalan mengenai dunia yang jauh lebih damaipernah dilontarkan oleh pemikir Amerika Serikat keturunan Jepang yaitu Francais Fukuyama, setelah berakhirnya perang dingin, dunia akan jauh lebih damai tanpa adanya perang. Namun, hingga saat penulis menulis paper ini, konflik masih dan sedang berlangsung.

Page | 229

Dalam kerangka teoritis keamanan dibagi menjadi dua yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional, konflik dan perang menjadi basis utama keamanan tradisional. Dalam perkembangannya, konsep keamanan bertransformasi dengan memberikan pemaknaan yang jauh lebih luas, sehingga keamanan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan perang dan konflik, namun dititik beratkan dalam keamanan individu itu sendiri, akses individu dalam mendapatkan makanan, kehidupan yang layak, mendapatkan akses kesehatan dan lain sebagainya—konsep ini kemudian kita kenal dengan konsep keamanan manusia (Human security).

Konsep keamanan manusia pada dasarnya diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1994 yang memberikan penekanan pada beberapa aspek antara lain: keamanan ekonomi (economic security); keamanan pangan (food security); keamanan Kesehatan (health security); keamanan lingkungan (environmental security); keamanan individu (personal security); dan keamanan komunitas (community security) serta keamanan politik (political security).⁷ Dalam konteks ini tentu individu mendapat perhatian yang sangat luas dalam kerangka pemenuhan kebutuhan baik ekonomi maupun politik.

Definisi mengenai keamanan manusia memang cukup beragam, beberapa negara memberikan penekan yang berbeda mengenai aspek keamanan manusi. Pemerintah Kanada melalui kementerian luar negerinya mendefinisikan keamanan manusia sebagai seseorang bebas dari ancaman hak orang lain, terjaminnya keamanan sebagai individu. Melalui politikluar negerinya Kanada fokus dalam mempromosikan keamanan individu dalam memastikan keamanan dan menjaga segala bentuk kekerasan. Di sisi lain ekonom dari Pakistan, Mahbubul Haq yang mengembangkan konsep pembangunan manusia mendefinisikan keamanan manusia sebagai menjaga martabat manusia, memastikan penyakit tidak menular, memastikan ketiadaan konflik etnis dalam kehidupan sosial manusia.⁸ Dari berbagai definisi ini dapat digambarkan bahwa kemananan manusia fokus dalam memberikan advokasi padamasyarakat untuk memuliakan masyarakat melalui pembangunan.

Salah satu indikator yang berkaitan dengan keamanan manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidupmanusia.

Tiga dimensi utama sebagai landasan dalam mengukur hal tersebut antara lain kesehatan, pendidikan dan ekonomi.⁹ Tiga komponen ini menjadi acuan dalam menentukan kualitas pembangunan yang menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia fasilitas dari dimensi-dimensi yang disebutkan di atas dan kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas yang disediakan.

Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Pembangunan Manusia? Arti Penting Pembangunan Manusia di KEK Mandalika

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 kawasan Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah 1.035, 67 Ha berdiri berbagai fasilitas infrastruktur pendukung sektor pariwisata; pengelolaan KEK Mandalika secara resmi dibawah kendali International Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemilihan Mandalika sebagai kawasan khusus didasarkan pada tingkat pengunjung wisatawan mancanegara yang terus meningkat dan diperkuat dengan terpilihnya Lombok dalam 2 kategori yaitu World Best Halal Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination dari World Halal Tourism, Abu Dhabi pada tahun 2015.¹⁰

Pembangunan KEK secara umum memiliki beberapa tujuan mendasar. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses ekspor-impor. Kawasan ini tentu diharapkan mampu berkembang dengan pola pasar bebas yang kompetitif. Kedua, mendorong penyerapan tenaga kerja, dengan banyaknya fasilitas di dalam KEK tentu akan membutuhkan banyak pekerja. Ketiga, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) keberadaan KEK tentu akan memberikan dimensi yang berbeda dalam pengembangan SDM, pengalaman dan pola kerja yang beragam akan memberikan pengalaman yang produktif.¹¹ Untuk menjawab tantangan dan merespon pembangunan yang signifikan, masyarakat harus menyiapkan diri baik dari pengetahuan dan kesadaran akan dampak pembangunan itu sendiri.

Tim pengabdian masyarakat berusaha memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat melalui serangkaian kegiatan. Desiminasi pemahaman mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat menjadi materi pertama yang kami sampaikan, berusaha membuka pemahaman bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan sektor pendidikan yang baik, fasilitas kesehatan yang mendukung, dan tentu memberikan kesejahteraan. Dalam kegiatan ini, kami berusaha untuk mengaktivasi kemampuan masyarakat dalam mengenali hak dan mencoba mendorong semangat advokasimasyarakat dalam menyuarkan haknya. Sehingga kita harapkan adanya peran aktif masyarakat menjadi katalisator yang secara berkesinambungan mendorong capaianpembangunan manusia.

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terkait Hak Dalam Pembangunan Manusia

Hak masyarakat dalam mengakses Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan tidak hanya

lahir dan berkembang dalam konteks pembangunan manusia, atau lahir dari perhatiandunia internasional melalui kerangka UNDP dan SDGs. Namun, secara tegas di dalam konstitusi UUD 1945 negara Republik Indonesia hal ini disampaikan dengan sangat lugas dan tegas, bahwa negara harus memastikan setiap warga negara dalam mendapatkan akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan.

Beragam permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan KEK Mandalikaseperti masalah ganti rugi tanah, minimnya pelibatan masyarakat dan persaingan politik menjelang pemilihan kepala daerah tentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses mewujudkan manusia yang berpendidikan, sehat dan tentu sejahtera. Terlebih lagi masalah yang kemudian timbul setelah KEK Mandalika dibangun, seperti minimnya investasi yang disampaikan oleh peneliti LIPI mengingat adanya persaingan para politisi lokal dalam konteks pemilukada, tata kelola, dan akuisisi lahan.¹²

Permasalahan yang digambarkan di atas mendorong kami untuk memberikan pemahaman mengenai proses-proses advokasi yang kemudian mendukung masyarakat KEK Mandalika dalam mendapatkan Hak yang semestinya didapatkan dalam konteks pembangunan manusia dan tentu hak atas proses pembangunan yang terjadi. Kesadaran ini tentu tidak tumbuh dengan cepat, desiminasi berkelanjutan menjadi kunci utama.

Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Manusia

Pembangunan kualitas manusia dalam kerangka konseptual dapat dipahami sebagai suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas individu, masyarakat, dan suatu bangsa untuk dapat secara aktif menentukan masa depannya. Kapasitas dalam hal ini ditekankan pada kapasitas dalam produksi, kapasitas dalam pemerintahan, kapasitas dalam keberlanjutan dan tentu kapasitas kedadran dalam ketergantungan manusia dengan manusiadan lingkungan.¹³ Dalam membangun manusia berbagai strategi dan metode dilakukan untuk mendorong lahirnya masyarakat yang peka akan hak dan kewajiban. Merujuk pada poin terakhir yaitu kesadaran antar manusia dan lingkungan, maka tentu kesadaran masyarakat akan mendorong secara aktif masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam pembangunan manusia.

Upaya yang kami lakukan dalam mendorong peran aktif masyarakat KEK Mandalika adalah memberikan pemahaman akan potensi besar dari pembangunan yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Dengan bekerjasama dengan komunitas masyarakat SWIM (Solidaritas Warga Intern Mandalika) kami berusaha memberikan pemahaman akanpotensi yang mereka bisa manfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama. Berbagai masalah yang timbul dari pembangunan kawasan tersebut akan mampu disuarakan oleh masyarakat kelas bawah dengan membangun sinergitas bersama, bergerak bersama dan menyuarakan hal yang sama. Sehingga membangun kesadaran melalui desiminasi permasalahan dan berbagai simulasi mengenai hal yang bisa dilakukan akan mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat dan berperan secara aktif menyuarakan suara komunitas.

Simpulan dan Saran

Pemahaman masyarakat mengenai informasi tertentu menjadi penentu dan sangat mendasar dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat atau kemudian mengaktifkan kesadaran tersebut. Sebagai sebuah contoh dalam konteks pembangunan manusia, masyarakat masih sangat minim pemahaman, mereka masih menganggap urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan urusan privat yang hanya dapat diselesaikan dengan kemampuan individu. Masyarakat belum memahami hak dan kewajiban pemerintah dan warga negara dalam konteks pembangunan, hal ini juga pada akhirnya menyebabkan pemerintah tidak maksimal dalam memberikan layanan pada masyarakat, sebaliknya masyarakat tidak maksimal menuntut haknya sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. "Human Security Amitav Acharya." *Global Governance*, no. March (2020):449–61.
- BPS. "Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021," 2021.
- Chotijah, Siti. "Positioning Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia (ComparativeStudy Lombok Dengan Berbagai Destinasi Halal Di Indonesia)." *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 1*, no. 01 (2017): 339–46.
<http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/98/62>.
- Damuri R. Y, Christian, D, and Atje, R. *Kawasan Ekonomi Khusus Dan Strategis Di Indonesia:Tinjauan Atas Peluang Dan Permasalahan. CSIS Indonesia*, 2015.
https://www.csis.or.id/uploaded_file/research/special_economic_zone_____policy_framework_and_prosp%0Aects.pdf.
- Indonesia, Bank. "Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2021." BankIndonesia, 2021. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan- Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Februari-2021.aspx).
- Maharani, Esthi. "Indeks Pembangunan Manusia NTB Meningkat." *Republika.co.id*, 2018.
<https://republika.co.id/berita/p7cy68335/indeks-pembangunan-manusia-ntb-meningkat>.
- Maumere, Dwi, Vita Ratnasari, Jurusan Statistika, Fakultas Matematika, and Pengetahuan Alam. "Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ridge" 4, no. 2 (2015).
- Pebrianto, Fajar. "LIPI Ungkap 2 Penyebab KEK Mandalika Minim Investasi," 2018.
<https://bisnis.tempo.co/read/1121307/lipi-ungkap-2-penyebab-kek-mandalika-minim-investasi>.
- Prasodjo, Tunggul. "Strategi Pembangunan Kualitas Manusia: Suatu Perspektif AdministrasiPublik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2016): 47.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2480>.
- Radarlombok.co.id. "Kualitas Pendidikan, NTB Ranking 33 Dari 34 Provinsi," 2019.
<https://radarlombok.co.id/kualitas-pendidikan-ntb-ranking-33-dari-34-provinsi.html>.

LAMPIRAN



Page | 233



